

**UPAYA PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM MENANGANI KORBAN
BENCANA DI WILAYAH KOTA BATU
(Studi Pada Di Kantor BPBD Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

RAHMAWATI HATTA

2016210147

**KOMPETENSI MANAJAMEN PELAYANAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG
MALANG
2020**

Ringkasan

Kabupaten Kota Batu merupakan salah satu instansi pemerintahan yang paling rawan bencana di Jawa Timur.. Dengan mengurangi bencana tersebut, oleh karena itu, diperlukan adanya Upaya Pelayanan Publik dalam penanggulangan bencana di Wilayah Kota Batu dengan menerapkan beberapa dan memiliki standar pelayanan publik sebagai acuan untuk menilai kualitas untuk memberi pelayanan yang berkualitas . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelayanan dukungan korban masyarakatdi Kota Batu dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan metode pengumpulan data termasuk termasuk metode triangulasi. Tergantung validitas observasi, wawancara, dokumen dan data. Cara menganalisis data, yaitu cara menyajikan, meringkas, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian Upaya Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menangani Korban Bencana Di Wilayah Kota Batu sudah dikatakan baik, jika dilihat dari prosedur pelayanan atau standar pelayanan yang diterapkan yaitu prosedur pelayanan,sarana prasarana, biaya pelayanan, kapan pelayanan, produk pelayanan dan kompetensi pelayanan. Faktor pendukungnya adalah semua stake holder ikut kerjasama dalam penanganan bencana, adanya pemasangan *Early warning System* dan Tim Reaksi cepat untuk mengkaji terlebih dahulu bencana yang terjadi dapat meningkatkan pelayanan yang lebih efektif. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana dan adapun Tahun sebelumnya terdapat anggaran yang terbatas sehingga dapat menghambat pelayanan penanganan terhadap bencana.

Kata Kunci: Upaya, Pelayanan Publik, Standar pelayanan, Penanggulangan Bencana,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Nurjanah,dkk 2013:81) suatu negara yang rawan terhadap bencana alam adalah baik secara natural ataupun ulah manusia adalah negara indonesia dan seluruh provinsi banyak yang alami rawan bencana salah satu kerentanan yang dapat merubah menjadi suatu bencana ini sangat berkaitan dengan geografis pemanasan global yang berdampak sangat luas.

Salah satu kondisi timbulnya bencana merupakan suatu proses muncul akibat terjadinya potensi bahaya yang bertemu dengan elemen rentan, sehingga terjadinya kehilangan, kerugian maupun kerusakan tidak bisa dihindarkan lagi. Dalam kondisi normal tersebut potensi mengalami bencana akan terjadi adanya proses gangguan tiba-tiba (shock) atau akibat penurunan kualitas lingkungan (stress). Dengan gangguan tersebut maka suatu sistem alami akan memberikan (meregenerasi, memperbaharui, mengorganisasi kembali elemennya), atau tetap dalam kondisi stabil dan bisa juga punah. Dalam mekanisme penanggulangan bencana, sering ditemui proses yang dimulai dari mitigasi hingga tahapan pemulihan kembali. (Rijanta, 2018 : 9-10).

Pemerintah sangat bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana karena tugas dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan standar pelayanan agarantisipasi korban yang semakin banyak dalam pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dan pemulihan dampak bencana .

PBNPB NO 4 Tahun 2016 tentang pelatihan penanggulangan bencana pada pasal 1 menjelaskan bahwa suatu upaya kebijakan pembangunan dalam mencegah terjadinya bencana, beberapa pusat dalam penanggulangan bencana akan disingkat pusdiklat PB suatu pendidikan pelatihan yang akan diberikan agar diberi keterampilan dalam penanggulangan bencana .

UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan bahwa Bangsa Indonesia bertanggung jawab atas perlindungan segenap bangsa dan negara. Upaya yang harus dilakukan pemerintah membantu mengurangi risiko bencana secara terencana, komprehensif dan sistematis.

Bencana yang sering melanda Kota Batu tersebut adalah seperti tanah longsor puting biliung dan beberapa bencana lainnya dan ada beberapa kecelakaan dipralayang ada luapan lumpur dan satu kejadian dan ada beberapa pencemaran lingkungan.

Dari beberapa uraian diatas terkait bencana dan terkait Penanggulangan Bencana sering terjadi diwilayah batu yang dibahas di Kota Batu yaitu pada Oktober Tahun 2019 (BPBD) Kota Batu menyatakan 515 rumah yang rusak 79 rumah rusak sedang dan 9 rumah rusak parah (Merdeka.com, report: Raynaldo Ghiffari lubabah).

Oleh karena itu, dalam kerangka good governance, peran pelayanan publik dapat menerapkan standar pelayanan yang berbeda saat melayani masyarakat yang terkena dampak berdasarkan SOP yang diberikan untuk memfasilitasi manajemen pelayanan yang baik.. (Report, Ray, Merdeka.com).

Berdasarkan observasi yang ada di atas Kota Batu dibentuk untuk Penanggulangan Bencana secara menyeluruh dimana hal ini memberikan penekanan aspek penanggulangan bencana dan fokus pada pengurangan resiko. Salah satunya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Batu yang terkena Bencana. Untuk mewujudkan kota Batu yang memiliki ketahanan yang kuat terhadap bencana alam, maka perlu dibentuk unit terkecil di kota tersebut, yaitu desa tahan bencana atau kelurahan. Digunakan dalam hal kejelian dan kesiapsiagaan dengan melaksanakan kegiatan implementasi terpadu yang tepat. Selain itu, peran penting lainnya dari BPBD Batu Khan adalah memberikan layanan pendampingan kepada desa-desa rawan bencana.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka proses pelayanan publik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu terhadap masyarakatnya sangat penting dan harus mendapatkan perhatian khusus didalam hidup berbangsa dalam melayani masyarakat pada bencana mampu mengurangi resiko bencana yang akan terjadi. Dengan memperjelas lagi peneliti ingin melakukan penelitian dengan Judul “Upaya Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani korban Bencana di Wilayah Kota Batu” (Pada Kantor BPBD Kota Batu, Jawa Timur)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya dibagi menjadi 2 :

1. Bagaimana Upaya Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menangani Korban Bencana Di wilayah Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani korban bencana di Wilayah Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam menangani korban bencana di wilayah Kota Batu,
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Daerah Dalam Menangani Korban Bencana di wilayah Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk akademi
Bahan acuan untuk penelitian yang sejenis
2. Untuk Instansi, sebagai bahan pertimbangan untuk tingkatkan Upaya Pelayanan Publik BPBD Dalam Menangani Korban Bencana di Wilayah Kota Batu.

3. Kami berharap hasil penelitian ini dapat membantu upaya pelayanan publik Otorita Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah Batu Khan serta memberikan pencerahan dan wawasan bagi peneliti pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurjanah, R. Sugiharto, D. Kuswanda, Siswanto.BP, Adikoesoemo. 2013.

Manajamen Bencana. Bandung. Alfabeta

R.Rijanta. 2018.*Manajamen Bencana*. Gajah Mada University Pers

Widya, Addiarto. 2019. *Manajamen Bencana dan Strategis membentuk Kampus Siaga Bencana dan Prespektif Keperawatan*

Mukarom, Jainal dan Laksana Wijaya, Muhibudin. 2018. *Manajamen Pelayanan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia

Khambali.2017. *Manajamen Penanggulangan bencana*.Yogyakarta. Andi

Pasolong, Arbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Sugiono.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung. Alfabeta

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif*. Bandung.Alfabeta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penannngulangan Bencana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

Jurnal

Cahyo Sasmito, Maria elis Sriani, Jisip Unitri Malang, jurnal. Vol.7, No.2. 2018.

Beong, Sugipto. 2018. *Badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana alam*. Jurnal. Kota Samarinda

Rizal, Wahyudha. 2018. *Implemntasi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Provinsi Dki jakarta*. Universitas sharif hidayatullah jakarta

Internet

Romandaniati Nia, Maramis. 2013. Pengertian bencana menurut para ahli. Blogspot, com. Kamis 16 April

Lubabah, Ghiffari Raynaldo. 2019. Peristiwa angin kencang/515-rumah rusak-di-Kota-Batu. Merdeka.com. Rabu 19 Mei 2021